PENGATURAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *GERING AGUNG COVID-19* DI WEWIDANGAN DESA ADAT PUCAKSARI, KECAMATAN BUSUNGBIU, KABUPATEN BULELENG

Dewa Nyoman Wija Astawa¹⁾, Ni Wayan Sadri²⁾.

^{1,2} Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan IKIP Saraswati Tabanan
Email: *dw.wija@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Desa Adat Pucaksari yang bertujuan untuk mengetahui (1) peranan *pecalang* Desa Adat Pucaksari dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19*, (2) dampak dari terjadinya *Covid-19* terhadap masyarakat Desa Adat maupun Desa Dinas. Subyek penelitian ini adalah: Masyarakat Desa Adat Pucaksari yang meliputi: Perbekel Desa Pucaksari, Bendesa adat, ketua *pecalang* Desa Adat, anggota masyarakat yang menjadi anggota *pecalang* Desa Adat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan pencatatan dokumen. Hasil penelitian ini adalah: (1) terjadi pergeseran fungsi dan peranan *pecalang*, karena adanya tiga faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pertama, membantu satgas *Covid-19* di bawah koordinasi satgas gotong royong Desa Adat Pucaksari; kedua, bertugas untuk mengatur keamanan dan ketertiban pelaksanaan *Yadnya*; ketiga, mengatur kegiatan usaha (2) dampak dari terjadinya pergeseran fungsi dan peranan *pecalang* terhadap masyarakat Desa Adat yaitu dilihat dari segi pencitraan artinya citra Desa Adat Pucaksari terangkat dengan *pecalang* mengalami pergeseran fungsi dan peranan di Desa Adat Pucaksari sedangkan untuk Desa Dinas tidak begitu merasakan adanya dampak yang signifikan, karena Desa Dinas hanya mengatur dan mengurus masalah-masalah administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam lingkup dibawah kecamatan.

Kata kunci: *Pecalang, Gering Agung, Desa Adat*

ABSTRACT

This research was carried out in the Pucaksari traditional village area which aims to find out (1) the role of the Pucaksari tradisional village pecalang in the prevention and control of Covid-19, (2) the impact of Covid-19 on the community of traditional village and the villages office. The subjects of this study were: Pucaksari tradisional village community which include: Perbekel Pucaksari village, kelian customary, traditional village pecalang chairman, members of the public who are members pecalang village people. This research is a qualitative descriptive and data collection using observation, interviews, and document recording techniques. The results of this study were: (1) there was a shift in the function and role of pecalang, due to three influencing factors, namely the first factor, helping the Covid-19 task force under the coordination of the mutual assistance task force of Pucaksari tradisional village; second, tasked with regulating the security and order of the implementation of Yadnya; third, regulate business activities (2) the impact of the shift in the function and role of pecalang to the tradisional village community in terms of imaging means that the image of the Pucaksari tradisional village is lifted by the pecalang experiencing a shift in function and role in the Pucaksari tradisional village while the department does not really feel any significant impact, because village office only regulates and manages government administration and development matters in the scope of sub-districts.

Key words: *pecalang, gering agung, traditional village people.*

1. Pendahuluan

Hakekat pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Untuk mencapai tujuan itu, maka pembangunan desa yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sangat mutlak untuk ditingkatkan pelaksanaannya, mengingat lebih dari 80% rakyat Indonesia bermukim di daerah pedesaan. Keberhasilan pembangunan desa yang menyentuh segenap lapisan masyarakat pedesaan dan sebagian besar rakyat Indonesia akan memungkinkan peningkatan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu jawaban atau tindakan yang tepat adalah suatu pembangunan desa yang menyangkut pembangunan disegala bidang, fisik material maupun mental spiritual, dalam suatu kesatuan integritas usaha yang menyeluruh dan terpadu.

Dalam koridor penyelenggaraan Pemeritahan Daerah, desa pada dasarnya merupakan unsur pemerintahan paling bawah yang langsung berhadapan dengan rakyat. Sehingga secara nyata dapat kita rasakan bahwasannya pelaksanaan pembangunan maupun perkembangan tradisi dan adat budaya khususnya di desa akan langsung menyentuh dan dirasakan manfaat maupun hasilnya oleh rakyat. Keberadaan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Bali selalu melibatkan dirinya dalam berbagai persoalan kemasyarakatan, tidak hanya dalam urusan yang berkaitan dengan tradisi dan unsur pelestariannya, tetapi juga bidang kemasyarakatan lainnya, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan, termasuk dalam upaya mencegah dan mengendalikan serta menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Ikatan sosial yang terjadi antara desa adat dengan masyarakat di Bali, dianggap menjadi salah satu kunci efektif dalam berbagai upaya pencegahan COVID-19. Oleh karena itu keberadaan desa

adat tersebut memiliki peran penting dalam mengatur warganya dalam mematuhi protokol kesehatan.

Pelibatan desa adat dalam penanggulangan penyebaran Virus Corona mulai dilakukan sejak 28 Maret 2020 yang dipertegas melalui Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 472/1571/PPDA/DPMA dan Nomor 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020. Keputusan ini juga ditandatangani Majelis Agung MDA Provinsi Bali. Sejak itu pula sebanyak 1.495 desa adat di Bali mendapat tugas tambahan menghalau penyebaran Virus Corona di desa. Tentu, 'membentengi' Bali dari pandemi Virus Corona merupakan pengalaman pertama sepanjang sejarah berdirinya desa adat di Bali. Sebab, selama ini desa adat selalu berkutat pada urusan berbau *niskala* semata. Namun kini, juga dilibatkan dalam urusan yang berbau *skala*.

Terkait tugasnya secara nyata, satgas di desa adat melaksanakan berbagai upaya sosialisasi, edukasi, pencegahan, pengawasan serta pembinaan terkait dengan Covid-19. Pemerintah melakukan berbagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19 termasuk mengerahkan petugas keamanan. Di Bali tidak hanya TNI dan Polri saja melainkan juga petugas keamanan desa adat atau *pecalang* yang dikerahkan hingga mampu menekan penyebaran virus Covid-19. Dalam pelaksanaannya, *pecalang* atau petugas keamanan adat Bali berperan sebagai ujung tombak dalam pengawasan serta pembinaan yang dilakukan bersama dengan sejumlah unsur terkait seperti TNI, Polri dan Linmas. Terlebih lagi saat ini pemerintah tengah menyiapkan penerapan tatanan kehidupan baru atau *new normal*, upaya lebih tegas dilakukan *pecalang* untuk mendisiplinkan warga yang melanggar protokol kesehatan dan tidak melengkapi diri dengan surat jalan dari masing-masing perusahaan serta surat keterangan negatif Covid-19 bagi pendatang yang tiba di Bali. hanya saja memang dalam penerapannya, *pecalang* tidak dapat memberikan sanksi, melainkan langsung melaporkan warga yang

melanggar kepada satpol PP, maupun kepolisian.

Desa Adat Pucaksari yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun, tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Terkait dengan tugas pencegahan dan pengendalian *gering agung* Covid-19, desa adat Pucaksari juga menjadi bagian dari tugas dimaksud.

Berdasarkan latar belakang seperti yang diuraikan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang layak dikedepankan, yaitu: Apakah fungsi dan peranan *pecalang* di Desa Adat Pucaksari? Bagaimana dampak dari terjadinya *Gering Agung* Covid-19 bagi masyarakat desa adat maupun desa dinas?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif dan subyek penelitian ditentukan menggunakan tehnik purposive sampling, yaitu masyarakat Desa Adat Pucaksari yang meliputi: Perbekel Desa Pucaksari, Bendesa adat, ketua *pecalang* Desa Adat, anggota masyarakat yang menjadi anggota *pecalang* Desa Adat. Data yang dikumpulkan baik melalui wawancara, observasi dan pencatatan dokumen yang disusun dan dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu dengan mengacu pada permasalahan yang akan diteliti atau dikaji. Selanjutnya proses analisis data dalam penelitian akan dilakukan dengan langkah-langkah secara siklus yaitu : (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, (4) pengambilan keputusan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Fungsi dan Peranan *Pecalang* di Desa Adat Pucaksari.

Desa Adat Pucaksari terletak di ujung Barat Kota Singaraja, yang batas-batas wilayahnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Di sebelah Utara : Desa Tista
- b. Di sebelah Timur : Wilayah Kabupaten Tabanan
- c. Di sebelah Selatan : Desa Tista dan Desa Bongancina
- d. Di sebelah Barat : Desa Sepang.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum, Desa Adat Pucaksari mengemban misi dan tanggungjawab sosial yang tidak hanya bersifat horizontal, menjaga keharmonisan hidup warga masyarakatnya (*pawongan*) dan melestarikan tradisi lingkungan (*palemahan*), tetapi juga bersifat vertikal dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan (*Parhyangan*). Untuk menunjang tugas dan kewajiban warga masyarakat berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian wabah Covid-19, Desa Adat Pucaksari, melalui paruman khusus *Prajuru* Desa Adat, setelah mendengarkan masukan dan pertimbangan dari *Sabha* Desa Adat, pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 menetapkan *Pararem* Desa Adat Pucaksari tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian *Gering Agung* Covid-19 di *Wewidangan* Desa Adat Pucaksari. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada *Prajuru*, Satuan Tugas (Satgas) Gotong Royong Pencegahan Covid-19 berbasis Desa Adat, *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian terhadap Covid-19. *Pecalang* atau *Langlang* atau dengan sebutan lainnya adalah satgas (satuan tugas) keamanan tradisional masyarakat Bali yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, baik di tingkat banjar dan atau di wilayah desa. Dalam pelaksanaannya, *pecalang* atau petugas keamanan adat berperan sebagai ujung tombak dalam pengawasan serta pembinaan yang dilakukan bersama dengan sejumlah unsur terkait seperti TNI, Polri dan Linmas.

Setelah mengadakan penelitian di lapangan, wawancara dengan I Gede Astika, selaku Wakil *Bendesa* Adat Pucaksari, menyatakan bahwa: Desa Adat Pucaksari memiliki 33 *pecalang* aktif.

Mereka bertugas setiap hari secara bergiliran dengan distribusi 5 orang bertugas di pos berbeda, yakni Posko Induk di Kantor Perbekel Desa Pucaksari, Pos Kemoning (perbatasan dengan Desa Tejabukit, wilayah Kabupaten Tabanan), Pos Pucaksari (perbatasan dengan Desa Sepang), Pos Beteng (perbatasan dengan desa Bongancina) dan di Pura Kahyangan Desa. Setiap hari para *pecalang* di Desa Adat Pucaksari bertugas dari pukul 08.00 wita hingga pukul 16.00 wita. *Pecalang* dalam bertugas di masing-masing pos selalu memperhatikan etika sebagai petugas keamanan Desa Adat dalam mengamankan ketertiban masyarakat yang memasuki wilayah Desa Adat Pucaksari.

Terkait tugasnya secara nyata, *pecalang* di desa adat Pucaksari melaksanakan berbagai upaya sosialisasi, edukasi, pencegahan, pengawasan serta pembinaan terkait dengan Covid-19. Dalam kesehariannya, *pecalang* bersama petugas kemananan lainnya rutin melakukan patroli di wilayah desa adatnya masing-masing untuk memastikan situasi di wilayahnya kondusif sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Setiap pelaku usaha yang ada di *wewidangan* Desa Adat Pucaksari berkewajiban menyediakan sarana cuci tangan di pintu masuk tempat usahanya. Operasional kegiatan usaha pasar tradisional dan pasar modern, seperti Mini Market dan sejenisnya, dibatasi dari pukul 06.00 sampai pukul 18.00 wita, atau dapat disesuaikan dengan perkembangan penyebaran Covid-19 melalui penetapan oleh *Bendesa* Adat setelah mendapatkan persetujuan *Prajuru* Desa Adat. Pedagang yang berjualan di pasar tradisional diatur sedemikian rupa sehingga jarak antara satu pedagang dengan pedagang lainnya sekurang-kurangnya 2,5 (dua koma lima) meter. Demikian juga halnya kepada warga yang masuk area pasar, berkewajiban menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jam malam di *wewidangan* umum Desa Adat Pucaksari juga dibatasi sampai pukul 22.00 wita. *Krama* Adat, *Krama tamiu*, dan *tamiu* yang tinggal di *wewidangan* Desa Adat Pucaksari dilarang

keluar rumah di atas jam malam sampai dengan pukul 06.00 wita hari berikutnya. Namun demikian, jika ada sesuatu hal yang bersifat mendesak harus keluar di atas jam malam, berkewajiban melaporkan diri kepada *Bendesa* Adat atau petugas desa adat lainnya.

Semua upacara *Panca Yadnya* yang bersifat *Ngawangun* (direncanakan), seperti *Karya Mlaspas*, *Ngenteg Linggih*, *Ngaben*, *Mamukur*, serta karya *ngawangun* lainnya agar ditunda pelaksanaannya sampai dicabutnya status pandemi Covid-19. Sedangkan upacara *Panca Yadnya* di luar yang bersifat *ngawangun* dapat dilaksanakan dengan ketentuan melibatkan peserta yang terbatas sebanyak banyaknya 25 (dua puluh lima) orang dan berkewajiban melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, mengikuti prosedur tetap pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19.

Secara umum memang benar terjadi pergeseran fungsi dan peranan *pecalang* di Desa Adat Pucaksari, dikarenakan adanya suatu kelembagaan tim penataan dan pengawasan *Gering Agung* Covid-19.

Bahwa yang melatar belakangi pergeseran fungsi dan peranan *pecalang* dari fungsi dan tugas pokoknya yaitu (1) bergeser dari menjaga keamanan wilayah dan ketertiban pelaksanaan upacara-upacara menjadi petugas Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian *Gering Agung* Covid-19 di wilayah Desa Adat Pucaksari. (2) bertugas untuk mengatur pembatasan kegiatan usaha, pembatasan jam malam, pembatasan kegiatan *Yadnya* dan kegiatan terkait lainnya (3) juga mengatur ketertiban masyarakat yang memasuki wilayah Desa Adat Pucaksari.

Walaupun berada dibawah tim Posko Gotong royong, secara mandiri pelaksanaan tugas *pecalang* sudah berjalan dengan efektif, dilihat dari kinerja *pecalang* itu sendiri yang setiap harinya mereka bergantian membantu pelaksanaan tugas posko Gotong royong, tetapi berdampak dan berpengaruh juga terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas pokok *pecalang* itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan

Putra Agung, (2005: 123) menyatakan bahwasannya "*Pecalang* sebagai *jagabaya* desa adat mempunyai tugas menjaga keamanan pada lingkungan *pelemahan* (wilayah) Desa Adat. Oleh karena itu, *pecalang* dalam melaksanakan tugasnya selalu awas dan waspada terhadap segala mara bahaya yang mengancam desanya".

3.2 Dampak Dari Terjadinya *Gering Agung* Covid-19.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng mengharapkan adanya sinergi dengan pemerintah desa dan desa adat untuk bersama-sama mengatasi dampak pandemi Covid-19 di Buleleng. Sinergi dimaksud salah satunya dengan pemberian sembako pada masyarakat miskin terdampak. Nantinya selain pemerintah daerah, pemerintah desa dan desa adat diharapkan dapat memberikan bantuan serupa. Pemkab Buleleng, melalui Dinas Sosial Kabupaten Buleleng saat ini tengah mempersiapkan bantuan sosial untuk masyarakat miskin terdampak dengan program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Bantuan tersebut nantinya berupa sembako dan bantuan non tunai yang dapat digunakan di E-Warung yang telah ditunjuk. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Buleleng saat ini berjumlah 68.005 jiwa. Sebelumnya pemerintah pusat sudah mengalokasikan dana untuk 38.557 jiwa, sedangkan sisanya yakni sebanyak 29.448 jiwa akan ditanggung oleh pemerintah daerah bersinergi dengan pemerintah desa dan desa adat. Pernyataan tersebut diungkapkan Sekda Buleleng, Drs. Gede Suyasa, M.Pd yang juga selaku Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Buleleng, saat memberikan informasi terkini terkait perkembangan penanganan Covid-19 di Buleleng, melalui teleconference bersama dengan para awak media, Rabu (8/4).

Dampak yang cukup signifikan yang ditimbulkan dari terjadinya *Gering Agung* Covid-19 terhadap masyarakat yang

berada di wilayah Desa Adat Pucaksari, sesuai yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan I Ketut Sukarata selaku Bendesa Adat Pucaksari, dinyatakan bahwa masyarakat Desa Adat Pucaksari yang sebagian besar (hampir 80%) warganya bergelut di bidang pertanian, sangat merasakan imbas langsung dari *Gering Agung* Covid-19. Terbatasnya arus lalu lintas dan perdagangan menyulitkan pemasaran hasil pertanian sebagai sumber penghasilan utama dan sumber penghidupan masyarakat desa adat Pucaksari. Hal ini dipertegas oleh I Ketut Maliani, selaku Perbekel Desa Pucaksari. Walaupun kondisi ekonomi yang mengandalkan penjualan hasil pertanian mengalami penurunan drastis, namun hal tersebut tidak sampai menimbulkan terjadinya gangguan keamanan. Disamping sudah mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah Kabupaten, alokasi dana desa yang ada juga diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak langsung Covid-19. *Pecalang* Desa Adat Pucaksari yang diberikan kepercayaan untuk mengawal hasil *perarem* Desa Adat Pucaksari No.1 Tahun 2020, tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian *Gering Agung* Covid-19 di *wewidangan* Desa Adat Pucaksari, dengan tugas dan kewenangannya dapat melaksanakan tugas berkoordinasi dengan tim Satgas gotong royong.

Dampak tidak selalu harus dimaknai sebagai sesuatu yang bersifat negatif. Masyarakat harus diberikan pembelajaran dan kesadaran baru bahwa setiap musibah harus diambil hikmahnya, demikian pula dampak lain yang dirasakan sebagai berkah dari *Gering Agung* Covid-19. Masyarakat Desa Pucaksari sangat menyadari betapa musibah ini memberi tantangan dan semangat baru untuk lebih kreatif dalam mengelola sumber daya dan potensi alam sehingga tidak hanya bisa bertahan tetapi juga meningkatkan kualitas hidup. Setidaknya dengan musibah Covid-19 ini, masyarakat semakin menyadari perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), menata kembali kebiasaan baru mencuci tangan

dengan sabun pada air mengalir atau dengan menggunakan *hand sanitizer*, mengkonsumsi makanan sehat, menghindari kerumunan massal (*social distancing*), menjaga jarak (*physical distancing*) sekurangnya dalam jarak 1 meter apabila bertemu dengan *krama* lainnya, membiasakan menggunakan masker saat keluar rumah, serta memperhatikan etika batuk dan bersin.

Melalui fungsi dan peranan *pecalang* Desa Adat sebagai pengemban tugas pelaksana *perarem* Desa Adat Pucaksari, sekaligus dapat mengangkat citra dan martabat Desa Dinas Pucaksari. Terjadi sinergitas berbagai komponen masyarakat, baik dalam lingkup masyarakat adat maupun dinas (administratif). Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Suasthawa, (2001: 9) yang menyatakan bahwa "Dua bentuk Desa yang lazim disebut dualisme desa di Bali, keduanya tidak mungkin dipisahkan sama sekali, tetapi hidup berdampingan dan saling melengkapi".

4. Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan pokok permasalahan tersebut di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa terjadi pergeseran fungsi dan peranan *pecalang* di Desa Adat Pucaksari, karena adanya tiga faktor yang mempengaruhi yaitu (1) bergeser dari menjaga keamanan wilayah dan ketertiban pelaksanaan upacara-upacara menjadi petugas Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian *Gering Agung* Covid-19 di wilayah Desa Adat Pucaksari. (2) bertugas untuk mengatur pembatasan kegiatan usaha, pembatasan jam malam, pembatasan kegiatan *Yadnya* dan kegiatan terkait lainnya (3) juga mengatur ketertiban masyarakat yang memasuki wilayah Desa Adat Pucaksari.

Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya *Gering Agung* Covid-19, tidak hanya berdampak langsung dalam bidang sosial-ekonomi, tetapi dari segi peran dan fungsi

lembaga adat di Desa Pucaksari, secara tidak langsung memberikan citra yang positif, terutama aktivitas gerakan bersama (gotong royong) semua lapisan masyarakat untuk secara bersama-sama melakukan pengamanan mengikuti hasil *perarem* Desa, dibawah koordinasi Satgas gotong royong. Dengan upaya gotong royong yang dilakukan oleh berbagai pihak khususnya di wilayah desa adat Pucaksari, diharapkan pandemi Covid-19 penyebarannya tidak semakin meluas dan aktivitas masyarakat termasuk aktivitas pariwisata di Pulau Dewata yang saat ini tengah mengalami keterpurukan secepatnya dapat pulih dan normal kembali.

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, peneliti dapat menyampaikan beberapa saran, yaitu (1) masyarakat bersama *pecalang* Desa Adat Pucaksari agar dapat menjaga dan melestarikan adat dan tradisi yang ada, dengan secara sadar mengikuti peraturan yang ada dalam melestarikan budaya maupun keamanan dan ketertiban untuk kebaikan bersama, (2) bagi prajuru Desa Adat Pucaksari, termasuk *pecalang* selalu siap siaga untuk mengamankan wilayah desa dan juga melestarikan tradisi yang ada di Desa Adat Pucaksari, (3) Perhatian dari pemerintah kepada para *pecalang* yang bekerja membantu pemerintah mencegah penyebaran Covid-19 tanpa mendapatkan gaji sangat diharapkan perhatian tersebut dapat berupa persediaan kelengkapan alat pelindung diri, hingga fasilitas tes kesehatan, karena para *pecalang* bertugas di lapangan, dan kerap bertemu dengan masyarakat luas.

Daftar Acuan

- Desa Adat Pucaksari. (2008). *Awig-Awig Pecalang Desa Adat Pucaksari*.
Maryaeni. (2008). *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. (2005). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Siwagatha, Ida Bagus Putra. (2014) *Pecalang dan Kesbang Linmas*. Gianyar: Panitia Penyelenggara Proyek Pemberdayaan Pecalang Kabupaten Gianyar.
- Sirtha, I Nyoman. (2008). *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat Di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Putra Agung, dkk. (2005). *Dialog Ajeg Bali (Perspektif Pengamalan Agama Hindu)*. Penerbit Paramita. Surabaya.
- Windia, Wayan P. (2002). *Celang, Celing, Celong, dan Pecalang*. Bali Post, 12 Mei 2002.
- Widnyani S.Ag, Nyoman dkk. (2003). *Ajag Bali Pecalang dan Pendidikan Budi Pekerti*. Denpasar: Penerbit SIC.